

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi sebagai alat untuk memperoleh kemerdekaan tidak hanya menjadi cerita sentral dalam sejarah Indonesia, tetapi juga merupakan faktor penting dalam pengakuan diri bangsa Indonesia. Semua upaya yang tidak stabil untuk menemukan identitas baru, untuk bersatu melawan kekuatan asing dan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil akhirnya tampak membuahkan hasil pada periode pasca perang. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan kebanyakan orang Indonesia, semua paksaan dari kekuatan asing tiba-tiba menghilang. Tak heran, akibatnya bukan munculnya negara baru yang harmonis, melainkan sering kali perjuangan sengit dan kerinduan rakyat akan kemerdekaan. Tradisi nasional bangsa Indonesia selanjutnya yang berjuang bersama selama revolusi memiliki dasar sejarah yang kecil. Namun dianggap sebagai era paling cemerlang dalam sejarah Indonesia. Pengorbanan yang dilakukan Indonesia atas nama revolusi membuktikan bahwa keyakinan Indonesia terhadap hak-hak merdeka memang didukung oleh banyak fakta (Ricklef, 2008: 446).

Menurut penjabaran di atas, menurut Sudiyono Jojoprajitno, revolusi Indonesia adalah "masyarakat bersenjata" yang tujuannya menghancurkan benteng imperialisme Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dibawa oleh Revolusi Rakyat (Sudjono, 2008: 46). Ada Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada akhir Agustus 1945, pemerintah Indonesia segera didirikan di Jakarta. Komite sebelum penyerahan Jepang. Menyusul pengumuman itu, pada 18 Agustus, Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden PPKI dan Presiden Sukarno (Noer, 2002: 135).

Suasana di Indonesia tetap tidak menentu di bulan-bulan setelah kemerdekaan. Selama periode ini, Belanda, didukung oleh sekutunya, berusaha untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Mereka menempuh berbagai cara untuk membawa negara yang baru merdeka itu kembali. Yang terpenting, melalui iklan besar-besaran. Salah satu promosi mereka adalah menuduh Sukarno Hatta sebagai "boneka" Jepang, alat fasisme Jepang, dan mengklaim bahwa Jepang telah mendirikan negara baru yang merdeka. Perang yang menegangkan ini bisa

dikatakan menegangkan dan kacau (Widjaja, 2008:52). Sementara itu, Fancano akan membentuk partai bernama Partai Nasionalis Indonesia. Rencana tersebut disampaikan dalam rapat KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945, partai yang dipimpin oleh Abikusno Tjokrosuseno dan Bpk. Satorno (Vijaya, 2008: 52).

Tentu saja, banyak pemimpin, terutama Bung Hatta, menentang rencana Bung Karno. Keberadaan partai politik tunggal dalam kehidupan demokrasi tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi, tetapi bahkan melanggarnya. yang mendukung mereka (Widjaja, 2008:52). Dalam situasi politik seperti itu, para pemimpin Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa kita mampu dan bahwa kita telah membentuk pemerintahan yang demokratis. Hatta adalah salah satu dari dua pendukung kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari antusiasme dan peran yang dimainkan oleh tokoh-tokoh lain dalam pembentukan republik ini, Sukarno dan Hatta menerima penghargaan terbesar. Dwitunggal mengalami masa-masa sulit sebelum dan sesudah mendeklarasikan kemerdekaan. Sukarno pada waktu itu juga tampaknya memiliki hubungan yang erat dengan Hatta, dan bahkan keputusan-keputusan tentang hal-hal besar dibuat dengan pengertian dan persetujuan penuh Sukarno (Noer, 2002: 134).

Jika pemerintah Indonesia yang baru tidak dapat membentuk pemerintahan yang demokratis dalam waktu yang relatif singkat, bukan tidak mungkin untuk memenangkan diplomasi Belanda melawan berdirinya Republik Indonesia. Dalam suasana seperti itu, pemimpin Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kita telah membentuk pemerintahan yang kompeten dan demokratis (Widjaja, 2008: 53). Secara khusus menunjukkan langkah-langkah politik dan diplomatik apa yang harus diambil untuk memuaskankan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden pada saat itu dan untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih baik.

Langkah pertama Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden adalah mengeluarkan pernyataan pemerintah atas nama Wakil Presiden, yang dikenal dengan Pernyataan Wakil Presiden Nomor 1 pada 16 Oktober 1945. Secara umum isi dekret tersebut menetapkan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, dan untuk sementara mulai berfungsi sebagai DPR pada tanggal 29 Agustus 1945. MPR dan MPR adalah hasil pilihan. Badan tersebut untuk sementara memikul tanggung jawab dan kekuasaan legislatif dan berpartisipasi dalam perumusan standar nasional. Mengingat

pentingnya KNIP dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, maka tugas-tugas tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok pekerja yang dibentuk kemudian (Widjaja, 2008:55).

Sekitar setengah bulan setelah pengumuman Wakil Presiden Nomor X, atas usul badan kerja KNIP yang diketuai Sjahrir, diumumkan Wakil Presiden berikutnya, termasuk rekomendasi pembentukan partai politik. Dekrit ini dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945. Penerbitan fatwa kedua wakil presiden itu tak lain merupakan bukti upaya kita mendukung demokrasi Indonesia dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pada tahun-tahun menjelang sistem parlementer, perdana menteri dan kabinetnya mengalami beberapa perubahan. Amir Syarifudin. Hingga pada gilirannya Bung Hatta diminta untuk mengambil alih sebagai perdana menteri dan wakil presiden pada tahun 1948. Kabinet Hatta dibentuk pada 29 Januari 1948, dan diumumkan dua hari kemudian, pada 31 Januari 1948. Saat ini, saat membentuk kabinet Hatta, Bung Hatta berhasil merumuskan rencana kebijakan politik.

1. Melaksanakan Perjanjian Renville dan bernegosiasi atas dasar yang ada.
2. Mempercepat berdirinya Indonesia Serikat
3. Mengadakan rasionalisasi
4. Pembangunan.

Program kebijakan ini menunjukkan upaya internal dan eksternal pemerintah. Sejak keluar adalah berunding dengan Belanda untuk menyelesaikan perselisihan antara Belanda dan kami, pembentukan Federasi Indonesia dapat dengan cepat dicapai pada tanggal 1 Januari 1949. Politik batin adalah tentang menyempurnakan organisasi kita dan dengan demikian meningkatkan kehidupan masyarakat. Ini hanya dapat dicapai jika rasionalisasi dilakukan. Ini sedang dikembangkan dalam skala besar. Jika rasionalisasi diutamakan, pembangunan tidak akan terlaksana sepenuhnya. Kami pikir kekuatan posisi kami baik di dalam maupun di luar satu sama lain terkait. Jika situasi internal tidak teratur, lemah, politik atau ekonomi, kita tidak dapat mencapai posisi yang kuat secara lahiriah. Di sisi lain, jika posisi Republik Indonesia dalam lingkungan politik internasional lemah, tidak mungkin mencapai situasi yang berorientasi ke dalam (inward looking).

Program kebijakan ini menunjukkan upaya internal dan eksternal pemerintah. Sejak keluar adalah berunding dengan Belanda untuk menyelesaikan perselisihan antara Belanda dan kami, pembentukan Federasi Indonesia dapat

dengan cepat dicapai pada tanggal 1 Januari 1949. Politik batin adalah tentang menyempurnakan organisasi kita dan dengan demikian meningkatkan kehidupan masyarakat. Ini hanya dapat dicapai jika rasionalisasi dilakukan. Ini sedang dikembangkan dalam skala besar. Jika rasionalisasi didahulukan, pembangunan tidak akan terlaksana sepenuhnya. Kami pikir kekuatan posisi kami baik di dalam maupun di luar satu sama lain terkait. Jika situasi internal tidak teratur, lemah, politik atau ekonomi, kita tidak dapat mencapai posisi yang kuat secara lahiriah. Di sisi lain, jika posisi Republik Indonesia dalam lingkungan politik internasional lemah, tidak mungkin mencapai situasi yang berorientasi ke dalam (inward looking).

“Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan RI (1945-1949)”.

B. Rumusan Masalah

Disini peneliti ingin mendeskripsikan tentang Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949).

Berdasarkan latar belakang masalah perlu di deskripsikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keadaan Politik Indonesia Pada Awal Kemerdekaan (1945-1949)
2. Bagaimana Politik diplomasi wakil presiden moh. Hatta (1945-1949)
3. Bagaimana Dampak Kebijakan Politik Wakil Presiden (1945-1949)

C. Batasan Konsep Dan Istilah

a. Batasan Konsep

Dalam penelitian historis batasan konsep dalam sejarah, yaitu:

1) Konsep Kebijakan Politik

Pada tahun 1948, Indonesia mengalami keterpurukan secara politik, ekonomi dan sosial. Naik turunnya kabinet Sjahrir dan Amir sebagian besar dipicu oleh oposisi di luar parlemen, dan Presiden Sukarno berangkat untuk mencari pemimpin yang kuat untuk menyelamatkan negara. Hatta dianggap memiliki posisi yang kuat baik di dalam maupun di luar ranah diplomatik, mampu mengintegrasikan perselisihan dari semua pihak. Pemerintahan Hatta mampu menyatukan partai-partai, dan meskipun mendapat tentangan kuat dari kiri, kabinet Hatta terbukti merupakan kabinet yang tidak akan digulingkan oleh

kekuatan ekstra-parlementer.

Semua pertimbangan politik Hatta sangat difasilitasi oleh pengalamannya sebagai sosialis demokratis. Hatta memiliki pengaruh besar pada pembentukan kebijakan politik. Hatta juga memperhitungkan kondisi internal dan eksternal Indonesia dalam menentukan kebijakannya, sehingga kebijakan politik Hatta adalah untuk memperkuat upaya Indonesia di dalam dan di luar perbatasannya. Kebijakan ini dapat dilihat pada tiga isu penting yaitu diplomasi, rasionalisasi dan pembangunan. Selama berkuasa, Hatta berusaha untuk berada di atas semua golongan, tetapi kabinet Hatta ditentang keras oleh kaum kiri, yang tidak menyetujui kebijakan kabinet presiden dan kabinet Hatta. Namun, fakta bahwa kabinet Hatta terbukti cukup kuat membuktikan bahwa kabinet Hatta tidak dapat digulingkan oleh oposisi yang dimobilisasi oleh kiri, yang memuncak dalam pemberontakan Madiun tahun 1948. Kekuatan pemerintahan Hatta tidak lepas dari keberhasilan Hatta mengadopsi Masyumi dan PNI sebagai dua partai utama saat itu. Hatta juga berhasil menguasai partai-partai Kristen Katolik. Kelompok militer Nasution sebagai pendukung kekuasaan pemerintahannya.

Akibat pemberontakan Madiun pada tahun 1948 dan agresi militer Belanda kedua (AMB II), situasi politik negara tidak stabil, sehingga tidak semua kebijakan kabinet Hatta dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, Hatta berhasil menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan menghasilkan "Sertifikat Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan" bagi Indonesia. diplomasi. Dalam kebijakan rasionalisasinya, Hatta meletakkan dasar untuk perampingan struktur dan manajemen negara dan angkatan bersenjata, meskipun upaya ini sedikit terhambat oleh pemberontakan Madiun 1948. Kebijakan pembangunan Hatta berhasil meletakkan dasar bagi rencana reinkarnasi untuk memperbaiki irigasi dan pembukaan lahan untuk meningkatkan produksi pangan. Namun, karena harga kebutuhan pokok dan inflasi yang masih tinggi, situasi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Di bidang pendidikan, Hatta berhasil melek huruf dan membangun sekolah keterampilan bagi generasi muda yang kembali dari garda terdepan.

Setelah Hatta tidak lagi menjadi perdana menteri, keterlibatan Hatta di panggung politik sebagian besar terjadi di belakang layar. Hatta lebih banyak berkontribusi dalam pembuatan kebijakan oleh pimpinan partai politik hingga akhirnya memutuskan untuk mundur sebagai wakil presiden. Penelitian lebih lanjut dapat memberikan gambaran bagaimana kebijakan politik Hatta dari

perspektif yang berbeda, seperti ekonomi, mampu melengkapi data pembangunan 1948-1950. Kajian lain yang juga bisa dilakukan adalah politik politik Hatta pada masa demokrasi parlementer (1950-1957) sebelum Hatta dilengserkan dari jabatan wakil presiden.

Menurut M. Rizki (2015:2), peran tokoh adalah “Peran tokoh didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu ter- utamanya dalam hal perkaitan dalam bidang yang dikuasai, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain”. Sedangkan menurut Kartika (2009:68), peran tokoh adalah sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan. Sejalan dengan dua teori tersebut Muh. Ahli Azizi (2010:65), menyatakan peran tokoh adalah “Orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi ataulembaga”.

Berdasarkan kepada ketiga teori tersebut dapat dinyatakan bahwa pengertian peran tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Menurut Roger. F. Soltau (2010:16), menyatakan politik adalah "Ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain".

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara semua perangkat negara dengan warganya dan negara lain. Sedangkan menurut Ossip K. Fletheim (2009:110), menyatakan bahwa politik adalah "Ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan gejala- gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi Negara". Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa politik adalah sebagai ilmu sosial tentang cara mendapatkan dan melaksanakan kekuasaan. Menurut J. Barents (2010:37), menyatakan :

“Ilmu politik adalah Ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas- tugasnya". Berdasarkan pandangan di atas, dapat diartikan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan, berjuang untuk memahami dan memahami negara dan kondisinya”.

Sedangkan menurut Gooding (2011:76), ilmu politik adalah “penggunaan kekuatan sosial secara paksa. Oleh karena itu, ilmu politik dapat diartikan

sebagai sifat dan asal dari paksaan ini, dan cara penggunaan kekuatan sosial melalui pemaksaan ini. Berdasarkan Dari sudut pandang di atas, dapat dijelaskan bahwa politik adalah perebutan kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, atau pengaruh orang lain, atau perjuangan melawan pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Dari keempat pengertian di atas, konsep politik dapat dijelaskan sebagai pengambilan keputusan melalui sarana publik, antara lain: Kekuasaan adalah kekuasaan yang diperoleh individu atau kelompok untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Pengambilan keputusan adalah hasil atau hasil dari proses mental atau kognitif yang mengarah pada pilihan tindakan dari beberapa pilihan yang tersedia.

Hatta mendirikan partai baru, Partai PNI-Baru (KMT, Indonesia). Dalam Kongres di Bandung, Juni 1932, Sjahrir terpilih sebagai Panglima Komando Umum PNI yang baru (Syahbudin, 2011:22-23). Tak lama kemudian, Hatta kembali ke Hindia, memberinya petunjuk baru di PNI. Sjahrir berniat kembali ke Belanda untuk melanjutkan penelitiannya. Namun, sebelum meninggalkan Hindia, pemerintah Hindia Timur Belanda menangkap pemimpin PNI-Baru. Kegiatan PNI-Baru dianggap berbahaya karena promosi artikel yang dimuat dalam Dowlat Rakjat (Hatta, 2010: 319).

2) Konsep tentang Diplomasi

Menurut Ellis Briggs, diplomasi adalah kegiatan bisnis resmi yang melibatkan pengiriman seseorang untuk mewakili pemerintah. Tujuan diplomasi adalah pemahaman di bidang politik (2010:202). Sedangkan Geoffrey McDermott (2009:39) menyatakan bahwa:

“Diplomasi merupakan pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional, masing-masing Negara, seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin memelihara/mengembangkan posisinya dalam kancah Internasional, begitulah adanya, kendati faktanya akan lebih baik jika lebih sedikit negara nationally minded di dunia ini”.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dijelaskan bahwa diplomasi adalah prosedur hubungan antar negara, yang bebas dan tergantung pada kemampuan dan keterampilan pelakunya. Menurut Honore de Balzacmu (2010:37):

"Pengetahuan bagi mereka yang tidak berkuasa, suatu ilmu pengetahuan menyenangkan yang selalu demi memenuhi dirinya sendiri, suatu ilmu pengetahuan yang mengijinkan praktisinya untuk tidak mengatakan

apapun dan berlinggung dibelakang anggukan kepala misterius, suatu ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa eksponen yang paling berhasil, pada akhirnya ialah mereka yang mampu berenang bersama kepalanya diatas arus kejadian-kejadian yang pura-pura ia lakukan" .

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dijelaskan bahwa diplomasi adalah seni berunding dengan cara damai sejauh mungkin dalam hubungan dengan negara lain, mengutamakan kepentingan satu negara, dan membiarkan ancaman terhadap kekuatan nyata jika damai. berarti gagal.

b. Batasan Istilah

1) Istilah Politik

Cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik, serta tinjauan umum dan analisis institusi dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari distribusi dan transfer kekuasaan dalam pengambilan keputusan, peran dan institusi pemerintah dalam pemerintahan dan organisasi internasional, perilaku politik, dan kebijakan publik.

2) Istiah Diplomasi

Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengelolaan urusan internasional, dan setiap negara ingin mempertahankan/mengembangkan posisinya di kancah internasional setiap saat, terlepas dari kaliber atau ukurannya.

D. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengikuti pertanyaan-pertanyaan di atas kemudian penulis akan menguraikannya agar dapat memahami arah kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan dari studi ini meliputi:

1. Keadaan Politik Indonesia Pada Awal Kemerdekaan (1945-1949)
2. Politik diplomasi wakil presiden moh. Hatta (1945-1949)
3. Dampak Kebijakan Politik Wakil Presiden (1945-1949)

E. Kegunaan kajian

Adapun kegunaan kajiian dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teori

Tidak hanya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Metro, tetapi juga dapat menambah ilmu

pendidikan khususnya untuk memahami sejarah kebijakan politik Mohammad Hatta.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan bahan atau literatur yang informatif bagi para sarjana khususnya para pembaca yang mempelajari sejarah Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat mewarnai dinamika kecerdasan dalam kemandirian di kalangan akademisi maupun nonakademik.

F. Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode historis. Metode itu sendiri berarti suatu cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan penelitian yang sama secara efektif dan efisien. Menurut Gilbert yang dikutip oleh J. Garagan pada Daliman (2012:75), berikut ini:

“Metode historis sebagai perangkat asas dan aturan yang sistematis didesain untuk membantu secara efektif agar dapat mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan hasil-hasil yang telah dicapainya dan ditampilkan dalam bentuk tertulis”

Dari uraian di atas, peneliti menggunakan metode historis untuk membantu mereka menelaah dan menganalisis secara kritis dan menguji data yang diperoleh dari berbagai sumber agar menjadi faktual dan terpercaya. Seperti yang dapat dilihat, ini adalah satu atau lebih langkah yang harus diambil. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode historis melalui penelitian kepustakaan. Peneliti menganalisis data dari sumber informasi tentang materi yang diteliti. Kami menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian sejarah, dan sumber informasi lainnya untuk mengumpulkan data untuk survei ini. Tentang masa lalu dan masa kini secara sistematis (Daliman, 2012:50). Atau, dengan kata lain, itu bisa menjadi penelitian yang dirancang untuk menggambarkan gejala, bukan apa yang terjadi selama penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah teknik atau metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.

a. Heuristik

Heuristik merupakan tahap pencarian, dan pengumpulan berbagai sumber data untuk menemukan segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah yang berkaitan dengan suatu topik atau judul penelitian. Menurut Daliman (2012:51), menyatakan:

“Dengan memasuki tahap pengumpulan sumber (heuristik) seorang peneliti sejarah memasuki lapangan (medan) penelitian. Dilapangan ini kemampuan teoritik yang bersifat deduktif-spekulatif sebagai tertuang dalam proposal atau rancangan penelitian akan diuji secara induktif-empirik atau pragmatif.”

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas bahwa penelitian ini menuntut peneliti untuk dapat memperoleh sumber daya dan pengetahuan yang relevan tentang sejarah melalui dokumen dan arsip. Selama proses penelitian ini, peneliti hanya menggunakan sumber tertulis untuk mendukung penelitian yang relevan, menggunakan sumber tertulis untuk melakukan penelitian, antara lain (Abdurahman, 2013:29):

- 1) Mengumpulkan buku/artikel yang mendukung dan relevan dengan judul yang diteliti.
- 2) Membaca buku yang dianggap relevan untuk mengetahui isi buku yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti harus mendapatkan sumber yang dapat dipercaya dan sumber tertulis yang mendukung penelitian.

Tabel 1: Keterangan Data Buku Sumber

No	Jenis Sumber	Keterangan
1	Mohammad Hatta Biografi Politik	Asli
2	Perjuangan Kita	Asli
3	Pikiran dan Perjuangan	Asli
4	Autobiografi Mohammad Hatta	Asli

b. Studi Kepustakaan

Kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang topik atau isu yang menarik. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, kajian ilmiah, artikel,

disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber lain yang disebut penelitian kepustakaan. Untuk melakukan penelitian sastra dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (Daliman, 2012: 54-55)

- 1) Kumpulkan buku, artikel ensiklopedia, dan dokumen lain tentang topik penelitian.
- 2) Fokus pada sumber penulisan, katalog, dan bahan diskusi yang sangat baik.
- 3) Buku dan bahan yang digunakan harus sesuai dengan judul buku yang diteliti.

2. Efektivitas alat pengumpulan data

Untuk mencapai hasil terbaik, peneliti perlu mendukung penelitiannya dengan data yang tepat. Kritik terhadap sumber kadang-kadang disebut sebagai tinjauan terhadap data penelitian historis. Ada dua jenis kritik atau verifikasi. Keandalan sumber atau reliabilitas atau kritik eksternal dan reliabilitas atau kehandalan atau kritik internal (Abdurahman, 2011: 108).

c. Kritik Ekstern

Menurut Daliman (2012:12) menyatakan bahwa :

“Kritik eksternal adalah survei untuk menguji kredibilitas suatu sumber agar diperoleh sumber yang benar-benar asli, bukan tiruan atau palsu. Semakin luas sumbernya semakin dapat dipercaya, sehingga biasanya diketahui waktu dan tempatnya”.

Penelitian sejarah membutuhkan kredibilitas sumber informasi yang diteliti dan menggunakan kritik eksternal untuk membantu peneliti menemukan sumber informasi yang digunakan dalam penelitiannya. A. Daliman (2012: 69) adalah objek kritik eksternal adalah untuk menguji otentisitas (keandalan) suatu sumber atau dokumen. Ada beberapa cara untuk menguji keaslian suatu sumber atau dokumen sejarah:

- 1) Penulis/informan dan penentuan tanggal
- 2) Palsu
- 3) Pemulihan teks

Berdasarkan pengamatan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan kritik eksternal memerlukan langkah-langkah berkala untuk mendapatkan sumber yang terbukti. Langkah-langkah kritik eksternal antara lain, Daliman (2012:71):

- 1) Uji apakah nama dan tanggal penulis benar dan asli dalam sumbernya.
- 2) Uji keaslian sumber atau dokumen untuk menghindari menjiplak sumber hasil.
- 3) Periksa relevansi daftar pustaka dan topik penelitian.

Untuk mengetahui validitas sumber-sumber data dikemukakan data table kritik ekstern sebagai berikut:

Tabel 2. Uji kesejatian sumber data “Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan RI (1945-1949)”

No	Tema yang dibahas	Sumber data/pengarang	Keterangan
1	Diplomasi	Rosihan Anwar	Asli (157-169)
2	Pikiran dan Perjuangan	Rosihan Anwar	Asli (137-341)
3	Nasioanalisme dan Internasionalisme	Rosihan Anwar	Asli (94-116)
4	Peranan Hatta	Adif Fahrizal	Asli (106-116)
5	Pemikiran Hatta	Adif Fahrizal	Asli (120-127)

d. Kritik Intern

Kritik internal merupakan uji keaslian informasi dalam dokumen, sebagaimana dikatakan Daliman (2012: 72): “Kritik internal adalah untuk menjaga apakah informasi yang terkandung dalam dokumen itu otentik, kredibel dan dapat diandalkan. Sebagai semacam kritik, kritik internal Kritik lebih banyak atau lebih tinggi”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kritik internal adalah alat untuk menguji keaslian sumber data yang dihasilkan oleh kritik eksternal, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh sumber data yang andal dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan penelitian ini, kritik internal dirancang untuk menguji kredibilitas sumber dan informan atau penulis dokumen. Adapun langkah-langkah kritik internal adalah sebagai berikut, Daliman (2012/73):

1. Membaca dan menyelidiki sumber data dan mencocokkan isi sumber data dengan peristiwa yang ada di buku.
2. Verifikasi keaslian dan konsistensi antara sejarah buku dan peristiwa yang terkandung di dalamnya.
3. Berkolaborasi, membandingkan dan mengukur.

2. Metode Analisis Data

Sebagai bagian dari penelitian, langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data adalah menganalisis kebenarannya. Inilah sebabnya

mengapa peneliti menggunakan langkah-langkah berikut ketika menganalisis data :

a. Interpretasi

Interpretasi adalah interpretasi dari fakta sejarah. Daliman (2012:83) menyatakan hal tersebut sebagai berikut: "Penafsiran adalah upaya menafsirkan fakta sejarah dalam rangka rekonstruksi realitas masa lalu." Fakta yang diperoleh dengan kejadian yang sebenarnya. Untuk mengambil langkah-langkah menafsirkan data, peneliti harus melakukan hal berikut: Daliman (2012: 85)

- 1) Membaca sumber data pada judul penelitian
- 2) Kritik eksternal dan kritik internal.
- 3) Memeriksa kecukupan sumber data dengan judul penelitian yang dibahas.

b. Historiografi

Historiografi adalah pandangan sejarawan tentang peristiwa sejarah, seperti ekspresi bahasa yang jelas, kuat dan baik yang ditampilkan oleh sejarawan. Menurut Daliman (2012:99): Historiografi adalah pandangan sejarawan tentang peristiwa sejarah, seperti ekspresi bahasa yang jelas, kuat dan baik yang ditampilkan oleh sejarawan. Menurut Daliman (2012:99):

Untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk menginterpretasikan data, peneliti harus melakukan hal berikut: Daliman (2012: 99)

- 1) Target audiens (pemirsa)
- 2) Apa yang harus saya tulis?
- 3) Gaya atau kategori: deskriptif, naratif, analitis
- 4) Gaya
- 5) Tulis alat struktural dan ilmiah

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa dalam historiografi beberapa tahapan antara sumber data dan judul penelitian harus dipenuhi dan dibandingkan, karena penelitian tidak hanya membutuhkan keaslian sumber data, tetapi juga historiografi sebagai salah satu tahapan atau metode dalam sejarah. studi.

G. Kajian Relevan

Dalam menulis cerita ini, peneliti juga harus mengadaptasi konsep-konsep yang berasal dari karya sejarah sebelumnya, baik berupa referensi cetak

maupun artikel majalah, agar diperoleh hasil historiografi yang akurat dan terpercaya. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti:

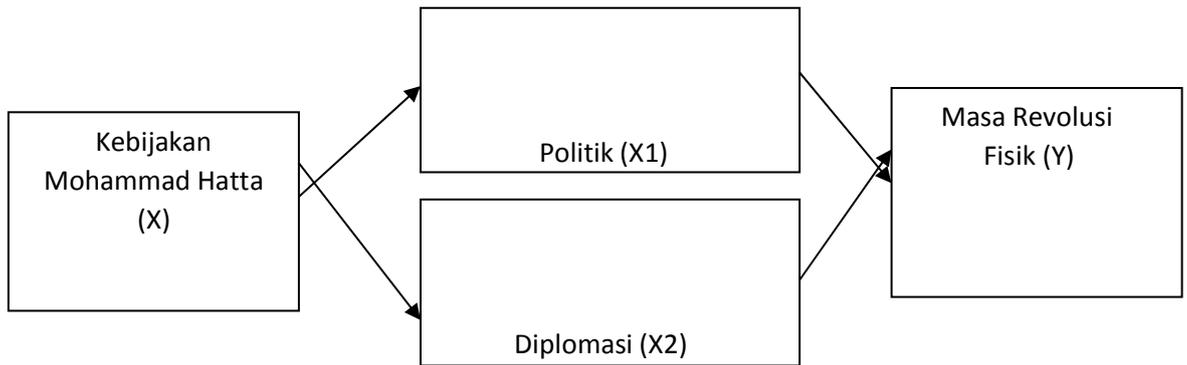
1. Skripsi Mimam Hasibuan berjudul *Pemikiran dan Peran Mohammad Hatta dalam Dinamika Politik Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian ini adalah Bung Hatta sebagai tokoh paling kontroversial saat itu. Karena ide Bung Hatta sangat berbeda dengan Moh yang mandiri yang ada saat itu. Hatta memiliki karakteristik yang kompleks. Sebab, menurutnya, menitikberatkan pada faktor masyarakat dan kesejahteraan sosial. Ini lebih sering disebut sosialisme populer.
2. Skripsi Agus Riyadi Siam bertajuk “*Kritik Muhammad Hatta Terhadap Fasisme*” oleh Pendidikan Sunan Kalijaga Yogyakarta diplomasi merupakan langkah alternatif.

Kajian yang diangkat penulis adalah “*Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta pada masa Revolusi Nasional Indonesia (1945-1949)*”. Meskipun terkait dengan penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Fokus penelitian ini juga pada kebijakan politik Mohammad Hatta, dan penulis akan mengkaji tentang diplomasi Mohammad Hatta. Dari kerangka diplomasi penderitaan dengan memperhatikan konsep diplomasi yang lahir dari dalam Indonesia, metode yang digunakan dalam melakukan diplomasi dan tindakan Bung Hatta. Selain itu, secara sistematis menggambarkan situasi, kondisi, dan peran Mohammad Hatta secara keseluruhan.

H. Kerangka Pikir

Dalam penulisan cerita ini, peneliti menggunakan pola pikir yang mendasari paradigma penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat, efektif dan efisien.

Kerangka Teoritis dan Konseptual



Gambar 1: Skema Kerangka Berpikir

I. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penyelidikan ini bertujuan agar penyelidikan ini tetap dalam kerangka yang ditetapkan, tanpa kesalahpahaman atau kerancuan, oleh karena itu ruang lingkup penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian : Historis
2. Objek Penelitian :
Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta Pada Masa Kemerdekaan RI (1945-1949)
3. Subjek Penelitian : Buku-buku, literatur, dan sumber lain yang relevan dan mendukung penelitian ini.
4. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung.
5. Waktu Penelitian : Tahun 2021